

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

1.1 Tinjauan Pustaka

1.1.1 *Good Corporate Governance* (GCG)

1.1.1.1 *Agency Theory*

Konsep *agency theory* didasari pada permasalahan agensi yang muncul ketika pengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya (Nuswandari, 2009). Jensen dan Meckling dalam Hisamuddin (2012) memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agen bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Dengan kata lain, *agency theory* memandang bahwa pihak manajemen tidak dapat dipercaya untuk bertindak sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *shareholders* pada khususnya.

Agency cost seperti yang pernah dirinci oleh Jensen dan Meckling dalam Hisamuddin (2012) terdiri dari tiga unsur yaitu:

- a. Biaya pengawasan oleh prinsipal untuk mengawasi bisnis yang dijalankan oleh agen;
- b. Biaya pengikatan agen untuk memastikan prinsipal bahwa agen tidak melakukan sesuatu yang dapat merusak kepentingan modal dan mengganti kerugian bila hal itu benar-benar terjadi;
- c. Sisa kerugian (*residual loss*) yang harus ditanggung oleh prinsipal akibat dari keputusan agen yang menyimpang dari keputusan yang dibuat oleh prinsipal ketika mempunyai kemampuan yang sama dengan agen.

Adanya dua partisipan tersebut (principal dan agen) menyebabkan timbulnya permasalahan tentang mekanisme yang harus dibentuk untuk menyalurkan kepentingan yang berbeda diantara keduanya. Sehingga dibangunlah *corporate governance* sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimalisasi konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya ekspropriasi atas pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas (Nuswandari, 2009).

Menurut Macey dan O'Hara, (2003) *Corporate governance* muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan *return*. *Corporate governance* diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer.

1.1.1.2 Corporate Governance

Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) Tahun 2019, *Corporate Governance* (CG) adalah serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.

Berdasarkan argumen yang dikembangkan oleh Keasey dan Wright dalam Sayidah (2007) *Corporate Governance* (CG) dipandang mempunyai dua dimensi besar. Pertama monitoring terhadap kinerja manajemen dan meyakinkan akuntabilitas manajemen terhadap pemegang saham yang menekankan

pertanggungjawaban dan dimensi akuntabilitas dari *corporate governance* (CG). Kedua, struktur, mekanisme dan proses *governance* yang memotivasi perilaku manajerial untuk meningkatkan kemakmuran bisnis dan perusahaan. Kedua perspektif tersebut perlu dipertimbangkan ketika ada usaha untuk menciptakan struktur dan prosedur *governance* yang mengarah ke perbaikan kinerja.

Dari berbagai definisi yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* (CG) merupakan :

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan yang harmonis tentang peran Dewan Komisaris, Direksi, RUPS dan para *stakeholder* lainnya.
2. Suatu sistem *Check and balance* mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang : pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.

Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran kinerjanya

1.1.1.3 Good Corporate Governance (GCG)

Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) Tahun 2019, *Good Corporate Governance* (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang baik didefinisikan sebagai struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh dewan komisaris dan direksi guna memberikan nilai tambah perusahaan yang berkesinambungan dalam jangka panjang.

Menurut Bank Indonesia dalam PBI nomor 11/33/PBI/2009, *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*),

pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).

Definisi *Good Corporate Governance* (GCG) menurut Bank Dunia adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur).

Menurut Komite Cadbury, *Good Corporate Governance* (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.

1.1.1.4 Prinsip Dasar *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) Prinsip Dasar *Good Corporate Governance* (GCG) antara lain sebagai berikut:

1. Transparansi (*transparency*)

Pengertian prinsip transparansi menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut OECD (2004) konsep *Corporate Governance* (CG) harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan.

Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Disamping itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.

Menurut Linan dalam Hastuti (2005) prinsip transparansi meliputi pengungkapan informasi yang bersifat penting, informasi harus disiapkan, diaudit dan diungkapkan sejalan dengan pembukuan yang berkualitas, penyebaran informasi harus bersifat adil, tepat waktu dan efisien. Sehingga para pengelola perbankan syariah harus meletakkan tanggung jawab yang sebesar-besarnya terhadap keselamatan dana yang telah dipercayakan oleh nasabah kepada mereka (Wibowo, 2009).

2. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Sedangkan menurut OECD (2004) tanggung jawab adalah adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini tercermin dalam kerangka corporate governance harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders*, seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan

dengan para *stakeholders* tersebut dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat dan kesinambungan usaha.

Menurut Linan dalam Hastuti (2005) juga menyatakan bahwa prinsip pertanggungjawaban ini meliputi antara lain, menjamin hak pihak-pihak berkepentingan, para pihak yang berkepentingan harus mempunyai kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka, dibukanya mekanisme pengembangan prestasi bagi keikutsertaan pihak yang berkepentingan, dan jika perlu, para pihak yang berkepentingan harus memiliki akses terhadap informasi yang relevan.

3. Akuntabilitas (*accountability*)

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Menurut OECD (2004) prinsip ini dapat dijalankan dengan cara adanya kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif. Konsepsi *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen perusahaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, dan akuntabilitasnya terhadap perusahaan dan pemegang saham dan anggota direksi harus bertindak mewakili kepentingan perusahaan dan pemegang saham.

Linan dalam Hastuti (2005) berpendapat bahwa prinsip akuntabilitas ini meliputi pengetahuan bahwa anggota Dewan Direksi harus bertindak mewakili kepentingan perusahaan dan para pemegang saham, penilaian

yang bersifat independen terlepas dari manajemen, dan adanya akses terhadap informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu.

Dalam prakteknya perbankan syariah juga harus benar-benar dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini terdapat peran penting Dewan Pengawas syariah dalam mengawasi operasional perbankan syariah agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan syariah (Wibowo, 2009).

4. Profesional (*professional*)

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, profesional adalah memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.

Prinsip ini menekankan agar pengelolaan perbankan syariah sebaiknya dikelola secara profesional ataupun tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak lain sehingga *conflict of interest* dapat dihindari sejauh mungkin. Jadi sikap seluruh jajaran bank sebagai entitas ekonomi yang mandiri, bebas dari kepentingan sepihak terutama yang berpotensi merugikan *stakeholders* dan mampu mengambil keputusan secara obyektif.

Menurut Luqman (2010) Penerapan prinsip independensi dapat dilakukan dengan cara:

- Penunjukan komisaris independen dan komite audit.
- Pengambilan keputusan manajemen yang obyektif.
- Penerapan sistem pengendalian intern yang sehat.

- Penerapan fungsi manajemen resiko.

5. Kewajaran (*fairness*)

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut *Forum Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) prinsip kewajaran ini meliputi, Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan atau kebijakan-terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*). Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas; membuat pedoman kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, *self-dealing*, dan konflik kepentingan; menetapkan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite, termasuk sistem remunerasi, menyajikan informasi secara wajar atau pengungkapan penuh material apa pun, mengedepankan *Equal Job Opportunity*. Prinsip kewajaran menurut Linan dalam Hastuti (2005) diungkapkan dalam adanya perlindungan bagi seluruh hak pemegang saham dan perlakuan yang sama bagi para pemegang saham.

1.1.1.5 Manfaat *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut *Forum Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik, antara lain:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*;
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *corporate value*;
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen.

Menurut *Bassel Committee on Banking Supervision* (BCBS) dalam Hisamuddin (2012), tujuan dan manfaat *Good Corporate Governance* (GCG) antara lain sebagai berikut:

1. Mengurangi *agency cost*, biaya yang timbul karena penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah timbulnya suatu masalah;
2. Mengurangi biaya modal yang timbul dari manajemen yang baik, yang mampu meminimalisir resiko;
3. Memaksimalkan nilai saham perusahaan, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan dimata publik dalam jangka panjang;

4. Mendorong pengelolaan perbankan secara profesional, transparan, efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris, direksi dan RUPS;
5. Mendorong dewan komisaris, anggota direksi, pemegang saham dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku;
6. Menjaga *Going Concern* perusahaan.

1.1.1.6 Metodologi Riset *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut *The Indonesian for Corporate Governance* (IICG), proses penilaian penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) mencakup aspek Hardware, Sofiare dan Brainware yang dilengkapi dengan prinsip moral dan etika, yang keseluruhannya dicerminkan dalam semua proses penetapan dan pelaksanaan strategi-strategi organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi (manajemen stratejik). Tahapan proses riset dalam pemeringkatan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Self-assessment*

Pada tahap ini perusahaan diminta untuk mengisi kuisisioner *self-assessment* yang terkait dengan penyelarasan sistem *Good Corporate Governance* (GCG) dalam proses bisnis melalui manajemen stratejik di perusahaannya.

2. Pengumpulan Dokumen Perusahaan

Pada tahap ini Perusahaan diminta untuk mengumpulkan dokumen dan bukti yang mendukung penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

di perusahaannya serta dokumen yang terkait dengan penyelarasan sistem *Good Corporate Governance* (GCG) dalam proses bisnis perusahaan melalui manajemen stratejik. Bagi perusahaan yang telah mengirimkan dokumen terkait pada penyelenggaraan *Corporate Governace Perception Index* (CGPI) tahun sebelumnya, cukup memberikan konfirmasi pada dokumen sebelumnya yang masih berlaku. Jika terjadi perubahan, dokumen yang direvisi harus dilampirkan.

3. Pembuatan Makalah dan Presentasi

Pada tahap ini perusahaan diminta untuk membuat penjelasan kegiatan perusahaan dalam menyelaraskan sistem *Good Corporate Governance* (GCG) pada proses bisnis melalui manajemen stratejik dalam bentuk makalah dengan sistematika penyusunan yang telah ditentukan.

4. Observasi ke Perusahaan

Pada tahap ini tim peneliti *Corporate Governace Perception Index* (CGPI) akan berkunjung ke lokasi Perusahaan peserta untuk menelaah kepastian dari penyelarasan sistem *Good Corporate Governance* (GCG) dalam proses bisnis melalui manajemen stratejik.

1.1.1.7 Sistem Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG)

Dalam menilai perusahaan yang mengikuti pemeringktan, program *Corporate Governace Perception Index* (CGPI) menggunakan 3 (tiga) ruang lingkup penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu aspek kepatuhan (*compliance*), kesesuaian (*conformance*), dan aspek kinerja (*performance*). Secara rinci uraian kega aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aspek kepatuhan (*compliance*) dalam implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan pemenuhan atas berbagai tuntutan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh regulator. Aspek kepatuhan menyatakan kepastian bahwa seluruh operasional bisnis perusahaan sudah dilakukan dengan baik dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku guna menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan perusahaan;
2. Aspek kesesuaian (*conformance*) dalam implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan keselarasan berbagai kebijakan dan operasional perusahaan dengan norma, etika, dan tata nilai yang dianut perusahaan. Aspek kesesuaian menyatakan kepastian kepatutan penyelenggaraan perusahaan guna menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan perusahaan;
3. Aspek kinerja (*performance*) dalam implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan hasil-hasil capaian perusahaan dalam memenuhi tuntutan operasional secara etis dan bermartabat. Aspek kinerja menyatakan kepastian pencapaian kinerja perusahaan guna menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan perusahaan.

Secara lebih rinci *Corporate Governance Perception Index* (CGPI)

menilai faktor-faktor berikut:

1. Komitmen, yaitu kesungguhan perusahaan dalam merumuskan inisiatif dan strategi serta kebijakan perusahaan dalam rangka menerapkan konsep *Good Corporate Governance* (GCG);

2. Transparansi, yaitu kesungguhan perusahaan dalam menyampaikan berbagai informasi perusahaan secara tepat waktu dan akurat;
3. Akuntabilitas, yaitu kesungguhan perusahaan dalam mempertanggungjawabkan seluruh proses pencapaian kinerja secara transparan dan wajar;
4. Responsibilitas, yaitu kesungguhan perusahaan dalam menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan;
5. Independensi, yaitu kesungguhan perusahaan dalam menjamin tidak adanya dominasi atau intervensi dari satu partisipan terhadap partisipan lainnya;
6. Keadilan, yaitu kesungguhan perusahaan dalam memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada seluruh pemegang saham (*shareholders*);
7. Kompetensi, yaitu kesungguhan perusahaan untuk menunjukkan kemampuannya dalam menggunakan otoritasnya sesuai dengan peran dan fungsinya, inovatif dan kreatif;
8. Kepemimpinan, yaitu kesungguhan perusahaan dalam menunjukkan corak kepemimpinan yang dapat mentransformasikan perusahaan ke arah yang lebih baik;
9. Kemampuan Bekerjasama, yaitu kesungguhan perusahaan dalam membangun kerjasama guna mencapai tujuan secara bermartabat. Pernyataan Visi, Misi dan Tata Nilai, yaitu acuan dalam mewujudkan kesungguhan perusahaan dalam memahami pokok-pokok yang terkandung di dalam pernyataan visi, misi dan tata nilai perusahaan;

10. Moral dan Etika, yaitu kesungguhan perusahaan untuk menerapkan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap proses bisnis, termasuk dalam proses merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi serta kebijakan perusahaan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG);
11. Strategi, yaitu kesungguhan perusahaan dalam merumuskan, mengimplementasikan serta mengevaluasi strategi dan kebijakan perusahaan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

1.1.2 Ukuran Perusahaan

1.1.2.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Menurut Jogiyanto (2013:282) menyatakan ukuran perusahaan sebagai suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar dan kecilnya menurut berbagai cara diantaranya total asset, nilai pasar saham dan lain-lain. Menurut Bambang Riyanto (2010:343) ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dilihat dari nilai ekuitas, penjualan atau total aktiva, sedangkan menurut Brigham dan Houston (2006:25) ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun.

Agnes Sawir (2004:101) menyatakan ukuran perusahaan sebagai determinan dari struktur keuangan dalam hampir setiap studi untuk alasan yang berbeda yaitu:

1. Pertama ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal. Perusahaan kecil umumnya kekurangan akses ke pasar modal yang terorganisir, baik untuk obligasi maupun saham. Meskipun mereka memiliki akses, biaya peluncuran dari

penjualan sejumlah kecil sekuritas dapat menjadi penghambat. Jika penerbitan sekuritas dapat dilakukan, sekuritas perusahaan kecil mungkin kurang dapat dipasarkan sehingga membutuhkan penentuan harga sedemikian rupa agar investor mendapatkan hasil yang memberikan *return* lebih tinggi secara signifikan.

2. Kedua, ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar menawar dalam kontrak keuangan. Perusahaan besar biasanya dapat memilih pendanaan dari berbagai bentuk hutang, termasuk penawaran spesial yang lebih menguntungkan dibandingkan yang ditawarkan perusahaan kecil, semakin besar kemungkinan pembuatan kontrak kontrak standar hutang. Ketiga, ada kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan *return* membuat perusahaan yang lebih besar dapat memperoleh lebih banyak laba. Pada akhirnya, ukuran perusahaan diikuti oleh karakteristik lain yang mempengaruhi struktur keuangan. Karakteristik lain tersebut seperti perusahaan sering tidak mempunyai staf khusus, tidak menggunakan rencana keuangan, dan tidak mengembangkan sistem akuntansi mereka menjadi suatu sistem manajemen

Pada umumnya perusahaan dengan ukuran kecil sangat riskan terhadap perubahan kondisi ekonomi dan cenderung kurang menguntungkan dibandingkan dengan perusahaan berukuran besar. Perusahaan yang besar cenderung memiliki kondisi yang lebih stabil. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang besar memiliki banyak sumber daya untuk mendanai kegiatan operasionalnya, sehingga perusahaan dapat lebih memaksimalkan kegiatan operasionalnya.

1.1.2.2 Jenis Ukuran Perusahaan

Keputusan ketua Bapepam No. Kep 11/PM/1997 dalam Nugroho (2013) menyebutkan perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aktiva (kekayaan) adalah badan hukum yang memiliki total aktiva tidak lebih dari seratus milyar rupiah, sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum yang total aktiva di atas seratus milyar.

Berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 1995, ukuran perusahaan terbagi menjadi tiga, yaitu :

1. **Perusahaan Kecil**

Perusahaan kecil yang dimaksudkan di sini adalah suatu perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah tidak termasuk bangunan dan tanah, memiliki hasil penjualan minimal 1 milyar rupiah/tahun.

2. **Perusahaan Menengah**

Perusahaan menengah yang dimaksud adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih antara 1 milyar sampai 10 milyar rupiah termasuk bangunan dan tanah, memiliki hasil penjualan lebih besar dari 1 milyar rupiah dan kurang dari 50 milyar rupiah.

3. **Perusahaan Besar**

Perusahaan besar yang dimaksud adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 10 milyar termasuk bangunan dan tanah, memiliki hasil penjualan lebih dari 50 milyar rupiah/tahun.

1.1.2.2.1 Jenis Aset

Menurut Priatna R. B Abdulah dan Suryana (2010:36), aktiva merupakan Seluruh sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan aktivitas usahanya.

Suatu perusahaan pada umumnya memiliki dua jenis aktiva yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Kedua unsur aktiva ini akan membentuk struktur aktiva. Struktur aktiva suatu perusahaan akan tampak dalam sisi sebelah kiri neraca. Struktur aktiva juga disebut struktur aset atau struktur kekayaan.

1.1.2.2.1.1 Aset lancar

Menurut Kasmir (2013:134) pengertian aktiva lancar adalah harta perusahaan yang dapat dijadikan uang dalam waktu singkat (maksimal satu tahun). Komponen aktiva lancar meliputi kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, biaya dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, pinjaman yang diberikan, dan aktiva lancar lainnya.

Menurut Djarwanto (2004:25), aktiva lancar dibagi sebagai berikut:

1. Kas, yaitu berupa uang tunai dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk membiayai operasi perusahaan.
2. Investasi jangka pendek (*temporary investment*), yaitu berupa obligasi pemerintah, obligasi perusahaan-perusahaan industri dan surat-surat hutang, dan saham perusahaan lain yang dibeli untuk dijual kembali, dikenal dengan investasi jangka pendek.
3. Wesel tagih (*notes receivable*), yaitu tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan dalam suatu promes.

4. Pihutang dagang (*account receivable*), meliputi keseluruhan tagihan atas langganan perseroan yang timbul karena penjualan barang dagangan atau jasa secara kredit.
5. Penghasilan yang masih akan diterima (*accrual receivable*), yaitu penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena perusahaan telah memberikan jasa-jasanya kepada pihak lain tetapi pembayarannya belum diterima sehingga merupakan tagihan.
6. Persediaan barang (*inventories*), yaitu barang dagangan yang dibeli untuk dijual kembali, yang masih ada di tangan pada saat penyusunan neraca.
7. Biaya yang dibayar dimuka, yaitu pengeluaran untuk memperoleh jasa dari pihak lain, tetapi pengeluaran tersebut belum menjadi biaya atau jasa dari pihak lain itu belum dinikmati oleh perusahaan pada periode yang sedang berjalan.

1.1.2.2.1.2 Aset Tetap

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2012) menyatakan bahwa aktiva tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk disediakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan yang administratif dan diperkirakan untuk digunakan lebih dari satu periode.

Suatu kelompok aset tetap adalah pengelompokan aset yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi normal entitas. Berikut ini contoh kelompok aset yang terpisah menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2012) :

1. Tanah
2. Tanah dan Bangunan

3. Mesin
4. Kapal
5. Pesawat Udara
6. Kendaraan bermotor
7. Perabot
8. Perlatan Kantor

1.1.2.3 Indikator Ukuran Perusahaan

Perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan besar atau kecil didasari oleh indikator yang mempengaruhinya. Adapun indikator dalam ukuran perusahaan menurut Jogiyanto (2013:282) oleh total asset atau nilai pasar saham, dan menurut Bambang Riyanto (2010:343) adalah nilai ekuitas, penjualan atau total aset. Dari beberapa indikator yang mempengaruhi pengklasifikasian dalam ukuran perusahaan, maka indikator dalam penelitian ini dibatasi agar lebih berfokus dan hasil yang dicapai sesuai dengan asumsi yang diharapkan. Salah satu indikator yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini adalah total aset.

Menurut PSAK Nomor 1 (2007:10) yang dimaksud dengan aset adalah segala manfaat ekonomi yang mengandung potensi dalam suatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional perusahaan. Mungkin pula berbentuk sesuatu yang dapat di ubah menjadi kas atau berbentuk kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas, seperti penurunan biaya akibat proses produksi alternatif.

Ukuran perusahaan yang dinilai dengan total aktiva (*total assets*). Alasan mengapa jumlah penjualan tidak menjadi indikator perhitungan ukuran perusahaan karena total penjualan tidak selalu menunjukkan besar kecilnya

ukuran perusahaan, hal tersebut dikarenakan nilai penjualan relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan nilai aktiva.

Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah bertambah dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama.

1.1.3 *Leverage* Keuangan

1.1.3.1 Pengertian *Leverage* Keuangan

Leverage adalah tingkat kemampuan perusahaan untuk menggunakan aset dan / atau dana yang memiliki beban tetap (hutang dan atau saham khusus) untuk mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan.

Menurut Agus Harjito dan Martono (2011:315) *Leverage* dalam pengertian bisnis mengacu pada penggunaan asset dan sumber dan sumber dana (*sources of funds*) oleh perusahaan dimana dalam penggunaan asset atau dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap.

Menurut Kasmir (2014:112) *Leverage* menunjukkan sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Perusahaan yang memiliki hutang lebih besar dari modal dikatakan sebagai perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi.

Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki biaya operasi tetap atau biaya modal tetap, maka perusahaan tersebut menggunakan *leverage*. Akan tetapi, penggunaan *leverage* pun dapat menimbulkan beban dan risiko bagi perusahaan, apalagi jika keadaan kinerja keuangan perusahaan sedang memburuk.

1.1.3.2 Tujuan dan Manfaat *Leverage* Keuangan

Penggunaan *Leverage* yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi, namun semua kebijakan ini tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan menggunakan *leverage* menurut Kasmir (2013:153), diantaranya:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditur);
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal;
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang;
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang;
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.

Sementara itu, manfaat dari *leverage* ini menurut Kasmir (2013:154) adalah:

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;

2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal;
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang;
5. Untuk menganalisis seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menganalisis berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang;
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, ada terdapat sekian kalinya modal sendiri.

1.1.3.3 Pengukuran *Leverage* Keuangan

Menurut Kasmir (2013:155) dan Fahmi (2013:127), secara umum terdapat 5 (lima) jenis rasio *leverage* yang sering digunakan oleh perusahaan, diantaranya:

1. *Debt to Total Asset Ratio* (DAR)

Rasio ini juga disebut sebagai debt ratio. *Debt ratio* merupakan rasio yang melihat perbandingan hutang perusahaan dengan cara mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. *Debt ratio* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}}$$

2. *Debt to Equity Ratio* (DER)

Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. DER ini ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditur. *Debt to equity ratio* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3. *Time Interest Earned Ratio*

Rasio ini disebut juga dengan rasio kelipatan. *Time interest earned ratio* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga, atau mengukur seberapa jauh laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan keuangan. *Time interest earned ratio* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Time Interest Earned Ratio} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Biaya Bunga}}$$

4. *Fixed Charge Coverage Ratio*

Rasio ini disebut juga dengan rasio menutup beban tetap. Rasio ini menyerupai *Times interest earned ratio*, hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh hutang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). Rasio *Fixed charge coverage* ini mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk pembayaran deviden saham preferen, bunga, angsuran pinjaman dan sewa. *Fixed Charge Coverage* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Fixed Charge Coverage Ratio} = \frac{\text{EBIT} + \text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban Sewa}}{\text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban Sewa}}$$

5. *Long-term Debt to Equity Ratio* (LTDtER)

Rasio ini merupakan rasio hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang dengan cara membandingkan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Long term debt merupakan sumber dana pinjaman yang bersumber dari hutang jangka panjang, seperti obligasi dan sejenisnya. *Long-term Debt to Equity Ratio* (LTDtER) ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{long term debt}}{\text{Modal}}$$

Peneliti menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) sebagai *leverage* karena DER mampu memberikan informasi kepada investor yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam berinvestasi. Informasi mengenai adanya penggunaan hutang oleh perusahaan dapat memberikan keuntungan bagi investor karena dengan adanya penggunaan hutang tersebut artinya perusahaan tersebut memiliki kondisi yang baik dalam memperoleh laba.

1.1.3.4 Rumus *Leverage* Keuangan

Dari Variabel *Leverage* ini dapat dihitung menggunakan indikator *Debt to Equity Ratio* dimana perhitungan ini merupakan perbandingan antara hutang/liabilitas dengan modal/ekuitas dengan rumus sebagai berikut

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Keterangan:

1. *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, termasuk hutang lancar dengan seluruh ekuitas (Kasmir, 2013:151). Adapun menurut Fahmi (2012:128) *Debt to Equity Ratio* adalah ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor.
2. Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor (Munawir dalam Setia : 2020). Adapun menurut Hantono dalam Setia (2020) Hutang adalah semua kewajiban perusahaan yang harus dilunasi yang timbul sebagai akibat pembelian barang secara kredit ataupun penerimaan pinjaman.
3. Modal adalah hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Dalam perkembangannya kemudian modal ditekankan pada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barangbarang modal (Bambang Riyanto, 2010:10). Adapun menurut Listyawan Ardi Nugraha (2011:9) Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.

1.1.4 Kinerja Perusahaan

1.1.4.1 Pengertian Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang dimiliki. Kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi pada jumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan, dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan sebagainya (Ceacilia, 2004).

1.1.4.2 Pengukuran Kinerja Perusahaan

Pengukuran kinerja merupakan suatu tolok ukur atau bagi manajemen perusahaan dalam menentukan kebijakan perusahaan, apakah kinerja perusahaan sudah baik dari segi keuangan maupun non keuangan. Menurut Vincent Gaspersz (2005), tujuan dari pengukuran kinerja adalah untuk menghasilkan data, yang apabila data tersebut dianalisis secara tepat akan memberikan informasi yang akurat bagi pengguna data tersebut.

Pengukuran kinerja perusahaan pada penelitian ini menggunakan kinerja pasar perusahaan. Kinerja pasar perusahaan pada penelitian ini dengan menilai performa manajerial perusahaan dengan cara menggambarkan nilai perusahaan tercatat dengan nilai perusahaan di pasar (Sudyatno, 2010 : 9). Pengukuran kinerja pasar pada penelitian ini diproksikan oleh Tobin's Q.

1.1.4.2.1 Tobin's Q

Tobin's Q ini dikembangkan oleh Profesor James Tobin (1967). Tobin's Q merupakan rasio yang menunjukkan estimasi pasar sehingga memberikan informasi yang rasional mengenai nilai perusahaan, karena memasukkan seluruh aset perusahaan. Jika nilai yang didapat dari hasil perhitungan lebih dari 1, artinya aktiva menghasilkan laba yang memberikan nilai yang lebih tinggi dibandingkan pengeluaran investasi, sehingga akan merangsang investasi baru (Weston dan Copelan, 2008:243). Rasio ini merupakan konsep yang berharga karena menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dolar investasi.

Secara sederhana, Tobin's Q adalah pengukur kinerja dengan membandingkan dua penilaian dari asset yang sama. Tobin's Q merupakan rasio dari nilai pasar asset perusahaan yang diukur oleh nilai pasar dari jumlah saham yang beredar dan hutang (*enterprise value*) terhadap *replacement cost* dari aktiva perusahaan (Fiakas, 2005). Apabila perusahaan memiliki nilai lebih besar dari nilai dasar sebelumnya, maka akan memiliki biaya untuk meningkatkan kembali, dan laba kemungkinan akan didapatkan. Berdasarkan pemikiran Tobin, bahwa insentif untuk membuat modal investasi baru adalah tinggi ketika surat berharga (saham) memberikan keuntungan di masa depan dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi dari biaya investasinya (Fiakas, 2005).

Menurut Smithers dan Wright (2008 : 37) *Tobin's q* dihitung dengan membandingkan rasio nilai pasar saham perusahaan dengan nilai buku ekuitas, Tobin's Q dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Tobin's Q} = \frac{(ME + DEBT)}{TA}$$

ME : Jumlah Saham Beredar x Harga Penutupan

DEBT : Total Hutang + Persediaan - Aktiva Lancar

TA : Total Asset

Rasio Tobin's Q merupakan ukuran yang lebih teliti tentang berapa efektif manajemen memanfaatkan sumber-sumber daya ekonomis dalam kekuasaannya. Menurut Smithers dan Wright (2008:40), keunggulan rasio Tobin's Q adalah sebagai berikut:

1. Tobin's Q mencerminkan aset perusahaan secara keseluruhan.
2. Tobin's Q mencerminkan sentiment pasar, misalnya analisis dilihat dari prospek perusahaan atau spekulasi.
3. Tobin's Q mencerminkan modal intelektual perusahaan
4. Tobin's Q dapat mengatasi masalah dalam memperkirakan tingkat keuntungan.

1.1.4.3 Manfaat Pengukuran Kinerja Perusahaan

Menurut Vincent Gaspersz (2005), manfaat sistem pengukuran kinerja yang baik adalah sebagai berikut:

1. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan.
2. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal.
3. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut (*reduction of waste*).

4. Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih konkrit sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi.
5. Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan memberi reward atas perilaku yang diharapkan.

1.2 Kerangka Pemikiran

Adanya perbedaan kepentingan antara pihak manajemen (agen) yang lebih mengetahui keadaan sebenarnya mengenai perusahaan dengan pihak pemilik (principal) memungkinkan timbulnya *moral hazard* (Veno, 2015 : 95). Oleh karena itu, *Good Corporate Governance* (GCG) dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.

Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik didefinisikan sebagai struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh Dewan Komisaris dan Direksi guna memberikan nilai tambah perusahaan yang berkesinambungan dalam jangka panjang (IIGC, 2014). *Good Corporate governance* (GCG) sangat berkaitan dengan bagaimana membuat para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka serta yakin bahwa manajer tidak akan menggelapkan atau menginvestasikan modal yang ditanamkan investor ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan (Prasinta, 2012).

Indikator penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) dalam penelitian ini menggunakan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI). Peserta yang mendapat *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) mengikuti empat tahapan penilaian, yaitu *self assessment*, sistem dokumentasi, penyusunan

makalah, dan observasi. Kuesioner sebagai alat ukur yang digunakan pada tahapan *self assessment* terdiri dari 12 aspek penilaian berupa pernyataan tentang hal-hal yang dipersepsikan oleh organ dan anggota perusahaan. Kuesioner disusun berdasarkan variabel riset seputar permasalahan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perspektif penciptaan nilai. Pada tahapan sistem dokumentasi, peserta *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) diharuskan menyerahkan tidak kurang dari 41 jenis dokumen atau disesuaikan dengan status perusahaan. Pada tahapan penyusunan makalah, setiap peserta *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) harus menyusun makalah yang menggambarkan serangkaian proses implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perspektif penciptaan nilai sesuai dengan sistematika isi dan penulisan yang telah ditentukan, dan dipaparkan pada saat observasi untuk memudahkan penilaian. Uraian makalah dari masing-masing peserta *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) diharapkan mampu memberikan gambaran tentang serangkaian proses dan program implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di perusahaan dan upaya perusahaan melakukan transformasi atas seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan nilai tambah secara etikal dan bermartabat.

Sebaran bobot untuk setiap jenis penilaian yaitu 21% untuk *self assessment*, 27% untuk sistem dokumentasi, 25% untuk makalah, dan 27% untuk observasi. Hasil riset dan pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) menetapkan tiga kategori tingkat kepercayaan yaitu 55 – 69 untuk perusahaan yang cukup terpercaya, 70 – 84 untuk perusahaan terpercaya, dan 85 – 100 untuk perusahaan yang sangat terpercaya (IICG, 2014).

Perusahaan yang telah menerapkan *Corporate Governance* dengan baik dan sudah memenuhi prinsip - prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten terbukti dapat meningkatkan integritas laporan keuangan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maylita Indah Putrianti dkk (2019) yang menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) yang menggunakan Indeks CGPI sebagai indikator perhitungannya memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan secara positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan Tobin's Q. Begitu pun dengan penelitian yang dilakukan oleh Bagas Andrean Agasva dan Harry Budiantoro (2020). Dalam penelitiannya tentang pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014- 2017, Bagas dan Harry (2020) menemukan hasil akhir bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap kinerja perusahaan yang kali ini diproksikan dengan nilai Tobin's Q. Sama halnya dengan yang dinyatakan oleh Yashinta Nancy dan Harjum Muharam (2017). Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Syadza Zulfa (2019), Eva Setiarini Damanik dan Yulia Istia Ningsih (2019) serta Agus Sutarman (2019) menunjukkan hasil yang sebaliknya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) tidak memiliki pengaruh yang positif atau signifikan terhadap terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan oleh Tobin's Q.

Selain *Good Corporate Governance* (GCG), kinerja perusahaan juga dipengaruhi oleh ukuran dari perusahaan tersebut. Ukuran Perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar dan kecilnya menurut berbagai

cara diantaranya total asset, nilai pasar saham dan lain-lain (Jogiyanto, 2013:282). Dari beberapa indikator yang mempengaruhi pengklasifikasian dalam ukuran perusahaan, indikator dalam penelitian ini dibatasi agar lebih berfokus dan hasil yang dicapai sesuai dengan asumsi yang diharapkan. Salah satu indikator yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini adalah total asset.

Menurut Priatna R. B Abdulah dan Suryana (2010:36), asset merupakan Seluruh sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan aktivitas usahanya. Melalui total aktiva perusahaan dapat dikategorikan besar atau kecil berdasarkan kekayaan yang dimiliki sedangkan total penjualan merupakan ukuran aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan kapasitas dalam satuan uang atau unit yang diperoleh melalui hasil penjualan seluruh produk selama jangka waktu tertentu (Swastha, 2005)..

Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah bertambah dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam waktu yang relatif lama. Perusahaan yang besar cenderung memiliki kondisi yang lebih stabil. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang besar memiliki banyak sumber daya untuk mendanai kegiatan operasionalnya, sehingga perusahaan dapat lebih memaksimalkan kegiatan operasionalnya. Berbeda dengan perusahaan dengan ukuran kecil, perusahaan ini sangat riskan terhadap perubahan kondisi ekonomi dan cenderung kurang menguntungkan dibandingkan dengan perusahaan berukuran besar. Sehingga dapat disimpulkan, besar kecilnya ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan (Nugroho, 2013).

Hal tersebut didukung oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian dari Riana dan Diah Iskandar (2017) membuktikan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Bagas Andrean Agasva dan Harry Budiantoro (2020) serta Perduti Lestari Rulimo dkk (2019). Keduanya mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan Tobin's Q. Sayangnya, dalam penelitian Yayak Ardy Pranata (2016) dan Febry Setyo Nugroho (2013) ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Adapun Dian Savitri dkk (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan sedangkan Wufron, 2017 menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif namun signifikan terhadap kinerja perusahaan.

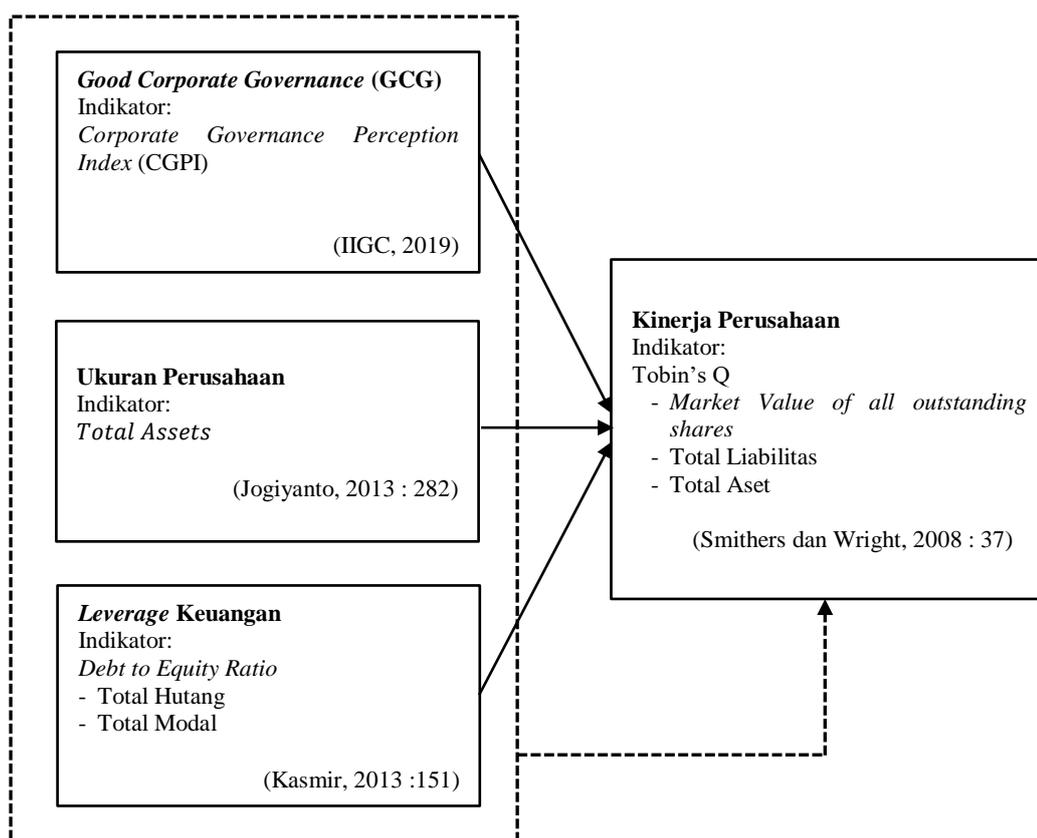
Selain ukuran perusahaan dan *Good Corporate Governance* (GCG), *leverage* keuangan pun memiliki pengaruh dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Menurut Kasmir (2014:112) *leverage* menunjukkan sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Perusahaan yang memiliki hutang lebih besar dari modal dikatakan sebagai perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi. Penggunaan *leverage* dapat menimbulkan beban dan risiko bagi perusahaan, apalagi jika keadaan kinerja keuangan perusahaan sedang memburuk. Rasio dari *leverage* menunjukkan risiko finansial yang dihadapi perusahaan. Dengan adanya komponen modal yang berasal dari hutang, pemilik akan memperoleh manfaat berupa keuntungan yang diperoleh dari penambahan modal, tetapi di sisi lain pemilik harus membayar bunga hutang. Jika perusahaan memperoleh hasil yang lebih besar dari dana yang dipinjam dari pada yang harus

dibayar sebagai bunga, maka hasil pengembalian untuk para pemilik akan meningkat.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) sebagai indikator dalam menghitung *leverage*. *Debt to Equity Ratio* (DER) menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan kewajiban agar untuk membayar hutang dengan ekuitas (modal sendiri). Setia (2020) menyatakan bahwa semakin tinggi rasio (DER) maka semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Rasio *leverage* yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin buruk, karena tingkat ketergantungan permodalan perusahaan terhadap pihak luar semakin besar. Dengan demikian, apabila *Debt to Equity Ratio* (DER) perusahaan tinggi, maka harga saham perusahaan akan rendah. Hal tersebut karena, jika perusahaan memperoleh laba perusahaan cenderung menggunakan laba tersebut untuk membayar hutangnya dibandingkan dengan membagi dividen. Sehingga, tinggi dan rendahnya *Debt to Equity Ratio* (DER) akan mempengaruhi kinerja perusahaan dalam hal keuangan dan pasar.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Perduti Lestari Rulimo dkk (2019). Dalam penelitiannya, Perduti dkk (2019) menyimpulkan bahwa *leverage* keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan Tobin's Q. Selain itu, Dedi Rossidi Utama dan Erna Lisa (2018) serta Roviqotus Suffah dan Akhmad Riduwan (2016) pun menemukan pengaruh positif dan signifikan *leverage* terhadap kinerja perusahaan. Berbeda dengan Perduti dkk (2019) serta yang lainnya, penelitian dari I Gusti Made Andrie Kayobi dan Desy Anggraeni (2015)

serta Siska Adelina, Restu Agusti, Yesi Mutia Basr (2014) justru menemukan hasil sebaliknya. *Leverage* keuangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan oleh Tobin's Q.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- > : Secara Parsial
 - - - - -> : Secara Simultan

1.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2014:16), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. *Good Corporate Governance (GCG), Ukuran Perusahaan dan Leverage Keuangan secara parsial memiliki pengaruh terhadap Kinerja Perusahaan berdasarkan hasil survei The Indonesian Institute For Corporate Governance (IICG) Tahun 2012-2020;*
2. *Good Corporate Governance (GCG), Ukuran Perusahaan dan Leverage Keuangan secara simultan memiliki pengaruh terhadap Kinerja Perusahaan berdasarkan hasil survei The Indonesian Institute For Corporate Governance (IICG) Tahun 2012-2020.*